

Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Alat Analisis Derajat Otonomi Fiskal Daerah

(Studi Kasus 5 Kabupaten/Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 1999-2006)

Muhammad Zaenuddin
zaen@polibatam.ac.id

Alumni Magister Sains Ilmu Ekonomi UGM – Dosen Politeknik Negeri Batam

Abstract

The research is aimed to know the local government ability in decentralization schema according to the local government financial report that using decentralization fiscal level between central and local government. The result shows that ratio between the local government income (PAD) and total income of local government (TPD) for all local government in Yogyakarta Province in 1996-2006 is very low, below 10%. The ratio between production sharing for tax and non-tax (BHPBP) and total income of local government (TPD) is also low. Therefore, these phenomena indicate that the ratio of decentralization financial is very low.

Others way to know the local government financial report is using independent level of government local that used the income of the local government for their budget. This shows that the local government income (PAD) contribution in the total expenditure of local government (TKD) is still low; therefore the local government financial autonomy is very low.

According to those results, the decentralization implementation in Yogyakarta province is not success.

The factors that influence in financial autonomy level are contribution level, aid level, government funding, and economy potential. These factors contribute in local government financial level at Yogyakarta Province. This paper shows that Contribution level variable (BM) and PDRB significantly influence local government financial level. Therefore, the BM variable will have negative relation and PDRB variable will have positive relation with the autonomy financial level. Beside that, aid variable (BN) and government funding (PP) only have a small effect in the autonomy financial level in statistic prefective.

1. Pendahuluan

Sejak tahun 2000 Indonesia memulai babak baru penyelenggaraan pemerintahan yakni pelaksanaan desentralisasi (Otonomi Daerah) di seluruh Dati II (kota dan kabupaten) yang jumlahnya mencapai 336 Kabupaten/Kota. Berdasarkan pada UU No. 22 tahun 1999 tentang “Pemerintah Daerah” dan UU No. 25 tahun 1999 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah” secara prinsip mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

mengutamakan asas desentralisasi dimana kota dan kabupaten bertindak sebagai “motor” sedangkan pemerintah propinsi sebagai koodinator. Oleh karena itu, hampir seluruh kewenangan pemerintah pusat diserahkan pada daerah, kecuali lima bidang; Politik Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Peradilan, Moneter, Fiskal dan Agama. Konsekwensinya, terjadi peningkatan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan (penyediaan barang publik dan pembangunan ekonomi) di tingkat daerah yang sangat besar. Menurut Suparmoko (2002) otonomi daerah didefinisikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah selain dalam rangka pemberdayaan masyarakat di daerah, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), juga upaya positif untuk peningkatan kemandirian daerah (Suparmoko,2002). Pemerintah daerah harus berupaya menggali potensi daerah untuk melakukan pembiayaan pembangunan di daerah. Kunci utama penentu keberhasilan Pemda dalam menjawab berbagai tantangan otonomi adalah desentralisasi fiskal yang merupakan bagian penting dalam implementasi otonomi daerah yakni upaya Pemda untuk memusatkan perhatiannya untuk memperbesar peranan PAD dalam struktur penerimaan daerah guna meningkatkan kemandirian keuangannya.

Menurut Halim (2001), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan kata lain, keberhasilan pengembangan otonomi daerah bisa dilihat dari derajat otonomi fiskal daerah – yaitu perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan APBD- yang semakin meningkat.

Bila dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, maka proporsi penerimaan asli (PAD) terhadap total penerimaan daerah (baik untuk daerah tingkat I maupun II) ternyata Indonesia jauh lebih tertinggal. Misalnya untuk Inggris (1983) 55%, Thailand

(1981) 54%, Malaysia (1981) 80%, Pakistan (1979) 89%, Srilangka (1981) 87%, Brasil (1983) 82%, Perancis (1985) 57%, dan Amerika Serikat (1983) 78% (IMF Government Financial Statistic, 1985 dalam tesis Muktiali,2000). Sedangkan untuk Indonesia besarnya proporsi PAD hanya 36,17% untuk tingkat I dan 14% untuk tingkat II (Nota Keuangan dan RAPBN 1999/2000, Republik Indonesia dalam tesis Muktiali,2000).

Sebagai contoh, studi Tampubolon et al (2002) tentang pelaksanaan otonomi daerah di kota besar Surabaya yang seharusnya memiliki potensi besar dalam kemandirian finansial, ternyata data pada tahun 2000-2002 menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surabaya hanya sekitar 25% dari penerimaan kota Surabaya. Fakta ini menunjukkan tingginya ketergantungan fiskal pemerintah kota Surabaya terhadap uluran tangan dari Pusat. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa lebih dari lima puluh persen (50%) sumber PAD di Indonesia masih bersumber dari dana perimbangan dimana 80% dari APBD digunakan untuk pengeluaran rutin dan kurang dari 5% untuk pengeluaran modal (Miranda, 2007).

Penelitian ini bermaksud mengetahui perkembangan derajat otonomi fiskal daerah setelah pelaksanaan otonomi daerah dengan mengambil studi kasus 5 (lima) kabupaten/kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Apakah terjadi peningkatan derajat otonomi fiskal daerah setelah pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, dengan kata lain bagaimana kemampuan daerah dalam menggali potensi PAD (yang seharusnya menjadi sumber keuangan terbesar) serta bagaimana tingkat ketergantungan (fiskal) daerah terhadap bantuan pusat. Penelitian ini juga akan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi derajat otonomi fiskal dan bagaimana hubungan antar faktor tersebut. .

2. Kerangka Pemikiran

Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Sekarang ini hampir semua negara menganut desentralisasi sebagai asas dalam sistem penyelenggaraan negara (Koswara, 1996). Menurut *United Nations* (1962) menjelaskan bagaimana proses penyerahan dari pusat ke daerah. Proses ini melalui dua cara yaitu dengan delegasi kepada pejabat-pejabatnya di daerah (*deconcentration*) atau dengan *devolution* kepada badan-badan otonomi daerah.

Koesoehatmadja (1979) membagi desentralisasi menjadi dua macam, yaitu *dekonsentrasi* dan *desentralisasi* ketatanegaraan. *Dekonsentrasi* yaitu pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan negara tingkat lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pelaksanaan tugas pemerintahan. Sedangkan *desentralisasi* adalah sistem untuk mewujudkan asas demokrasi yang memberikan kesempatan kerja kepada rakyat untuk ikut serta dalam proses penyelenggaraan kekuasaan negara.

Syafruddin (1986) menyatakan bahwa otonomi bermakna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Di dalamnya terkandung dua aspek utama. Pertama, pemberian tugas dan kewenangan untuk menyelesaikan suatu urusan. Kedua, pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut. Dengan demikian otonomi merupakan kesempatan untuk menggunakan prakarsa sendiri atas segala macam nilai yang dikuasai untuk mengurus kepentingan umum.

Rodinelli dan Cheem (1988) membedakan empat bentuk *desentralisasi* yang dijabarkan sebagai berikut:

- *Deconcentration*, terbagai menjadi *field administration* dan *local administration*. Menurutnya desentralisasi dalam bentuk dekonsentrasi pada hakikatnya hanya merupakan pembagian kewenangan dan tanggung jawab administratif antara departemen pusat dan pejabat pusat di lapangan.
- *Delegation to semi autonomous* yaitu suatu pelimpahan pengambilan keputusan dan kewenangan manajerial untuk melakukan tugas-tugas khusus kepada suatu organisasi yang tidak secara langsung berada di bawah pengawasan pemerintah pusat.
- *Devolution to local government* yaitu pemerintah pusat membentuk unit-unit pemerintahan di luar pemerintah pusat dengan menyerahkan sebagian fungsi-fungsi tertentu untuk dilaksanakan secara mandiri.
- Privatisasi (*transfer of function from government to non government institution*) adalah suatu tindakan pemberian kewenangan dari pemerintah daerah kepada badan-badan sukarela, swasta, dan swadaya masyarakat atau dapat juga peleburan badan pemerintah menjadi badan swasta.

Sistem Otonomi di Negara-negara Lain

Pemerintah daerah di Inggris (*local government*) secara hukum memperoleh kekuasaan dari pusat dan berada di bawah subordinasi pemerintah pusat. Pemerintah pusat menyatakan secara terperinci kekuasaan-kekuasaan apa yang harus dilaksanakan dan apa yang boleh dikerjakan. Melalui undang-undang pemerintah daerah disertai wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus suatu urusan pemerintahan.

Sumber pendapatan daerah di Inggris berasal dari pendapatan asli daerah, pinjaman dan bantuan. Pendapatan asli daerah pada umumnya tidak mencukupi untuk membiayai perkembangan laju pertumbuhan yang cepat sehingga daerah banyak bergantung kepada pemberian bantuan dari pusat dengan banyak syarat.

Di Inggris dikenal dua macam bantuan, yaitu *specific grant (grant in aid/conditional grant)* dan *block grants (general grant/unconditional grant)*. *Specific grant* merupakan bantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan atau jasa-jasa publik yang telah ditentukan pemerintah pusat. *Block grants* adalah bantuan kepada pemerintah daerah yang tidak disertai dengan ikatan atau syarat-syarat tertentu. Dalam hal ini pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk mengalokasikan dana sesuai dengan kemauan dan kehendak daerah yang bersangkutan.

Di Perancis sistem otonomi daerah menggabungkan antara desentralisasi dan dekonsentrasi. Penyelenggaraan tugas-tugas desentralisasi dijalankan bersama-sama dengan dekonsentrasi dengan meletakkan kedudukan rangkap pimpinan eksekutif pemerintahan dalam kedudukan sebagai alat daerah (Kepala Daerah) dan alat pusat (Kepala Wilayah).

Untuk kondisi keuangan daerah di Perancis menyerupai di Inggris. Pendapatan Asli Daerah di Perancis tidak mampu mencukupi kebutuhan biaya penyelenggaraan otonomi daerah. Diperkirakan sekitar 50% kebutuhan anggaran dipenuhi dari hasil pendapatan asli daerah, kekurangannya dipenuhi dari pinjaman dan bantuan dari pemerintah pusat.

Pokok-pokok dalam Undang-undang Otonomi Daerah Tahun 1999

Undang-undang Pemerintah Daerah (UU NO. 22 Tahun 1999) salah satunya mengatur tentang kewenangan daerah dan keuangan daerah. Dijelaskan bahwa kewenangan daerah mencakup dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang

politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga keuangan negara.

Sedangkan dalam hal keuangan daerah dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah masih dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan juga Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN). Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

Sedangkan menurut Undang-undang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah (UU NO 25 Tahun 1999) menyatakan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah :

- a. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah serta pendapatan lain yang sah.
- b. Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
- c. Pinjaman Daerah, daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri maupun luar negeri.

Otonomi Fiskal Daerah

Otonomi fiskal daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Desentralisasi fiskal dapat diketahui dengan menghitung rasio pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah, rasio subsidi dan bantuan pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi terhadap total penerimaan daerah, rasio pajak pusat untuk daerah terhadap total penerimaan daerah dan rasio penerimaan daerah terhadap total penerimaan negara (Smith,1983).

Dhiratanayaint(1984) menyatakan bahwa otonomi daerah bisa diwujudkan apabila disertai dengan otonomi keuangan dan ekonomi yang baik. Artinya pemerintah daerah semakin kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber keuangan daerahnya sehingga tidak tergantung kepada pemerintah pusat.

Salah satu pilar yang harus ditegakkan dalam mengembangkan otonomi daerah yang lebih nyata adalah aspek pembiayaan. Tanpa keseimbangan pemberian otonomi antara tanggung jawab dengan pendanaannya maka esensi otonomi menjadi kabur (Basri, 1999).

Sementara menurut Ichlasul Amal (1999) keterkaitan antara desentralisasi dan penerimaan asli daerah (PAD) yang paling realistis adalah bahwa desentralisasi memungkinkan pemberdayaan sosial, memberikan keleluasan kepada daerah untuk beradaptasi dengan perkembangan sosial ekonomi yang cepat di tingkat lokal sehingga memungkinkan untuk menggali potensi PAD secara maksimal.

Penelitian Sebelumnya

Lodewyk (1999) meneliti masalah otonomi keuangan daerah tingkat II di Propinsi Sulawesi Utara. Menurutnya faktor yang paling berpengaruh terhadap derajat otonomi fiskal Dati II di Sulawesi Utara adalah tingkat bantuan pemerintah yang menunjukkan hubungan positif. Sementara kemampuan ekonomi dan transfer pemerintah menunjukkan pengaruh yang bervariasi ada yang positif ada negatif.

Syukur (1999) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi otonomi keuangan di Kabupaten Ende (Nusa Tenggara Timur). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat perkembangan ekonomi dan bantuan umum berpengaruh positif terhadap otonomi keuangan; sementara transfer pemerintah tidak signifikan terhadap otonomi keuangan.

Nanga (1991) melakukan penelitian pada Daerah Tingkat II Malang, Probolinggo dan Trenggalek di Jawa Timur Hasil penelitian menyatakan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) pada umumnya masih sangat rendah dan ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat masih tinggi. Variabel yang berpengaruh terhadap derajat otonomi fiskal daerah adalah tingkat perkembangan ekonomi daerah dan bantuan pemerintah pusat.

Utomo (1996) mengemukakan terdapat empat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah. Pertama, kondisi lingkungan yaitu terdapatnya dukungan infra dan supra struktur politik dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah. Kedua, hubungan antar organisasi yang berkaitan dengan jalannya pemerintahan daerah. Ketiga,

sumber daya, meliputi kemampuan keuangan daerah dan dukungan dari pusat berupa bantuan/subsidi keuangan serta potensi/kemampuan ekonomi daerah. Keempat, kemampuan aparaturnya dalam melaksanakan tugas.

3. Metode Penelitian

Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Menurut Musgrave (1991) dalam mengukur kinerja keuangan daerah dapat digunakan derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, antara lain:

$$1) \frac{PAD}{TPD}$$

$$2) \frac{BHPBP}{TPD}$$

$$3) \frac{Sum}{TPD}$$

Selain itu, dalam melihat kinerja keuangan daerah dapat menggunakan derajat kemandirian daerah untuk mengukur seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah (Halim, 2001), antara lain:

$$4) \frac{PAD}{TKD}$$

$$5) \frac{PAD}{KR}$$

$$6) \frac{PAD + BHPBP}{TKD}$$

Dimana,

PAD	= Pendapatan Asli Daerah
BHPBP	= Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
TPD	= Total penerimaan Daerah
TKD	= Total Pengeluaran Daerah
KR	= Pengeluaran Rutin
Sum	= Sumbangan dari Pusat

Semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Apabila dipadukan dengan derajat desentralisasi fiskal yang digunakan untuk melihat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, maka akan terlihat kinerja keuangan daerah secara utuh.

Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut.

Sedangkan untuk membahas bagaimana hubungan antara derajat otonomi fiskal daerah dan faktor yang mempengaruhinya, menggunakan model sebagai berikut:

$$\mathbf{ADR} = \mathbf{a_0} + \mathbf{a_1BM_{it}} + \mathbf{a_2BN_{it}} + \mathbf{a_3PDRB_{it}} + \mathbf{a_4PP_{it}} + \boldsymbol{\mu_{it}}$$

Dengan,

ADR = Derajat Otonomi Fiskal Daerah

BM = Bantuan Pemerintah Pusat/Dati I

BN = Sumbangan Pemerintah/Dati I

PDRB = Potensi Ekonomi Daerah

PP = Tingkat Pembiayaan Pemerintah

μ = variable gangguan

i = kabupaten ke-i, dan

t = waktu

Dari persamaan di atas maka terdapat dimensi waktu (t) dan dimensi daerah (i) secara bersamaan. Dengan demikian data yang digunakan adalah data *time series dan data cross section*. Untuk mengestimasi model dengan data *time series dan cross section* maka metode yang digunakan adalah *model pooling* data dengan menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Untuk melihat valid tidaknya hasil estimasi yang diperoleh dalam penelitian ini maka dilakukan pengujian terhadap asumsi klasik yaitu melakukan uji autokorelasi, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas.

Definisi dan Pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan:

- Derajat Otonomi Fiskal daerah (ADR), diukur dengan menggunakan *administrative dependent ratio* yaitu perbandingan antara PAD dan total APBD (dalam bentuk %).
- Tingkat Sumbangan Pemerintah (BM), sumbangan dari pemerintah pusat/dati I kepada Dati II dalam bentuk Subsidi Daerah Otonom (SDO). Tingkat sumbangan diukur dengan membandingkan antara besarnya sumbangan dengan APBD (dalam bentuk %).
- Tingkat Bantuan Pusat (BN), dana yang diberikan oleh pusat kepada dati I dan dati II untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah. Tingkat bantuan pusat diukur dengan membandingkan besarnya bantuan pusat terhadap APBD (dalam bentuk %).
- Potensi Ekonomi Daerah (PDRB), menggunakan indikator PDRB atas dasar harga berlaku (untuk menyesuaikan variabel lain yang semuanya bersatuan %, maka PDRB dalam penelitian ini dikalikan dengan 10^{-14} rupiah)
- Tingkat Pembiayaan Pemerintah (PP), proporsi APBD terhadap PDRB atas harga berlaku menunjukkan tingkat pembiayaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di daerahnya. Menurunnya APBD terhadap PDRB mengindikasikan semakin meningkatnya peranan sektor-sektor di luar sektor pemerintah daerah dalam memberikan kontribusi untuk pembangunan ekonomi daerah (dalam bentuk %)

Penelitian ini menggunakan studi kasus 5 (lima) kabupaten/kota se Propinsi DI Yogyakarta yaitu Kabupaten Kulonprogo, Bantul, Gunungkidul, Sleman dan Kota Yogyakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS D.I Yogyakarta. Data yang digunakan adalah data 1999 sampai 2006 yang meliputi: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota se Propinsi DI Yogyakarta, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pengeluaran Total Daerah (TKD) dan Pengeluaran Rutin (KR), dan Sumbangan (BM) dan Bantuan (BN) dari pemerintah Pusat.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Keadaan Keuangan Daerah

Bagaimana profil keuangan terutama perkembangan APBD dan PAD tiap kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. APBD Kabupaten/Kota se-Propinsi D.I. Yogyakarta 1999-2006 (000 Rp)

	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta
1999	80,453,772	105,069,703	96,125,809	143,357,359	105,326,621
2000	75,354,060	99,538,767	102,766,125	153,705,551	108,228,456
2001	237,022,009	289,899,347	224,550,463	333,319,605	243,769,299
2002	283,649,480	358,901,175	269,285,618	415,658,056	319,305,763
2003	338,086,546	436,016,305	361,315,338	429,845,582	406,856,436
2004	285,753,028	406,547,724	380,483,379	445,864,900	341,144,382
2005	296,626,320	424,914,879	335,110,261	472,496,957	357,937,550
2006	431,648,580	597,788,834	517,621,525	670,179,070	513,883,784

Sumber : D.I Yogyakarta dalam Angka 1999-2006(BPS,diolah)

Tabel 2. Pertumbuhan APBD Kabupaten/Kota se-Propinsi D.I. Yogyakarta 1999-2006 (%)

	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta	Rata-rata/tahun
1999/2000	93.66%	94.74%	106.91%	107.22%	102.76%	101.06%
2000/2001	314.54%	291.24%	218.51%	216.86%	225.24%	253.28%
2001/2002	119.67%	123.80%	119.92%	124.70%	130.99%	123.82%
2002/2003	119.19%	121.49%	134.18%	103.41%	127.42%	121.14%
2003/2004	84.52%	93.24%	105.31%	103.73%	83.85%	94.13%
2004/2005	103.81%	104.52%	88.07%	105.97%	104.92%	101.46%
2005/2006	145.52%	140.68%	154.46%	141.84%	143.57%	145.21%
Rata-rata kab/kota	140.13%	138.53%	132.48%	129.10%	131.25%	

Sumber : D.I Yogyakarta dalam Angka 1999-2006(BPS,diolah)

Tabel 1 dan 2 di atas memberikan gambaran bagaimana perkembangan Anggaran Belanja Daerah (APBD) tiap Kabupaten/Kota se Propinsi D.I. Yogyakarta 1999-2000 yang

mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun masing-masing Kulonprogo (140.13%), Bantul (138.53%), Gunungkidul (132.48%), Sleman (129.10%), dan Kota Yogyakarta (131.25%). Kenaikan tertinggi terjadi pada 2001 (dibandingkan dengan 2000) yang mengalami kenaikan rata-rata 253.28% dimana kenaikan tertinggi terjadi di Kabupaten Kulonprogo (314.54%) dan Bantul (291.24%). Tetapi pada 2004 (dibandingkan 2003) terjadi penurunan APBD (94.13%) yang terjadi di Kabupaten Kulonprogo, Bantul dan Kota Yogyakarta.

Tabel 3 menggambarkan bagaimana perkembangan Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang menjadi indikasi tingkat kemandirian daerah dalam pembiayaan di daerah masing-masing. Sejak 2000, hampir semua daerah Kabupaten/Kota di Yogyakarta mengalami kenaikan PAD dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing daerah per tahun adalah Kulonprogo (126,99%), Bantul (130.36%), Gunungkidul (126.12%), Sleman (127.36%), dan Kota Yogyakarta (123.21%).

Tabel 3. PAD Kabupaten/Kota se-Propinsi D.I. Yogyakarta 1999-2006 (000 Rp)

	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta
1999	5,961,693	8,011,806	5,409,513	17,125,445	24,790,128
2000	6,726,479	7,074,418	5,719,379	17,889,885	22,452,952
2001	10,132,946	14,073,123	8,852,286	29,677,397	40,352,593
2002	16,225,501	22,425,147	13,486,860	38,908,193	56,377,460
2003	18,250,898	32,882,359	17,481,692	42,522,488	68,621,564
2004	17,514,817	32,181,481	20,728,379	54,913,300	70,412,081
2005	22,512,410	33,701,537	23,424,202	64,030,957	79,414,345
2006	28,891,548	39,330,140	25,485,903	86,472,070	91,626,503

Sumber : D.I Yogyakarta dalam Angka 1999-2006(BPS,diolah)

Sedangkan data keuangan dan ekonomi lainnya seperti bagaimana perkembangan sumbangan dan bantuan yang diterima oleh pemerintah Ka/Kota se Propinsi DI Yogyakarta dari pemerintah pusat serta bagaimana perkembangan PDRB dapat dilihat pada lampiran.

4.2 Derajat Otonomi Fiskal

Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Menurut Musgrave (1991) dalam mengukur kinerja keuangan daerah dapat digunakan derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Pertama yang dilihat adalah bagaimana perbandingan antara Pendapatan Asli daerah (PAD) dengan Total Penerimaan Daerah (TPD) atau PAD/TPD. Makin tinggi perbandingan ini berarti menunjukkan makin tingginya derajat otonomi fiskal.

Tabel 11. Perbandingan antara PAD dan TPD Kab./Kota se-Propinsi D.I Yogyakarta 2000-2006

	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta	Rata-rata/ tahun
2000	8.93%	7.11%	5.57%	11.64%	20.75%	10.80%
2001	4.28%	4.85%	3.94%	8.90%	16.55%	7.71%
2002	5.72%	6.25%	5.01%	9.36%	17.66%	8.80%
2003	5.40%	7.54%	4.84%	9.89%	16.87%	8.91%
2004	6.13%	7.92%	5.45%	12.32%	20.64%	10.49%
2005	7.59%	7.93%	6.99%	13.55%	22.19%	11.65%
2006	6.69%	6.58%	4.92%	12.90%	17.83%	9.79%
Rata-rata per kab/kota	6.39%	6.88%	5.25%	11.22%	18.93%	9.73%

Sumber : D.I Yogyakarta dalam Angka 1999-2006(BPS,diolah)

Tabel 11 di atas menggambarkan derajat otonomi fiskal di Kabupaten/Kota se Propinsi D.I Yogyakarta setelah pelaksanaan otonomi daerah (2000-2006). Dilihat dari data statistik masing-masing kabupaten/kota mengalami kenaikan (pertumbuhan PAD) namun relatif kecil yakni di bawah 10% (Kulonprogo mengalami rata-rata kenaikan PAD 6,39%, Bantul sebesar 6,88%, Gunungkidul 18,93%), hanya Sleman dan Kota Yogyakarta yang mengalami tingkat kenaikan PAD di atas 10% yakni masing-masing 11,22% dan 18,93%. Data ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kenaikan PAD (dibandingkan TPD) yang menunjukkan bahwa derajat otonomi fiskal (dilihat dari porsi PAD terhadap APBD) masih relatif rendah, yakni di bawah 10%.

Kedua, untuk melihat derajat otonomi fiskal daerah yakni dengan melihat perbandingan antara Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) dengan Total Penerimaan Daerah (TPD): BHPBP/TPD. Makin tinggi perbandingan ini menunjukkan makin tingginya derajat otonomi fiskal di masing-masing daerah.

Tabel 12. Perbandingan antara BHPBP dan TPD Kab/Kota se-Propinsi D.I Yogyakarta 2000-2006

	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta	Rata-rata/tahun
2000	7.56%	8.11%	6.66%	7.36%	11.36%	8.21%
2001	2.95%	3.78%	3.67%	6.33%	13.59%	6.06%
2002	3.16%	3.61%	3.49%	6.73%	7.86%	4.97%
2003	3.24%	3.92%	3.23%	5.79%	7.94%	4.82%
2004	3.22%	4.02%	2.26%	6.34%	8.67%	4.90%
2005	3.12%	4.06%	2.59%	6.90%	7.96%	4.92%
2006	2.73%	3.24%	2.49%	5.89%	6.40%	4.15%
Rata-rata per kab/kota	3.71%	4.39%	3.48%	6.48%	9.11%	

Sumber : D.I Yogyakarta dalam Angka 1999-2006(BPS,diolah)

Tabel 12 di atas menggambarkan derajat otonomi fiskal di Kabupaten/Kota se Propinsi D.I Yogyakarta setelah pelaksanaan otonomi daerah (2000-2006) dengan melihat perbandingan antara BHPBP dengan TPD. Sama halnya dengan perbandingan PAD dan TPD masing-masing kabupaten/kota memang mengalami kenaikan tapi sangat kecil di bawah 10% bahkan di bawah 5% (di Kulonprogo sebesar 3,71%, Bantul sebesar 4,39%, Gunungkidul 3,48%), hanya Sleman dan Kota Yogyakarta di atas 5% yakni masing-masing 6,48% dan 9,11%. Data ini juga menunjukkan masih rendahnya tingkat kenaikan BHPBP (dibandingkan TPD) yang mengindikasikan bahwa derajat otonomi fiskal (dilihat dari porsi BHPBP terhadap APBD) masih sangat rendah.

Ketiga, derajat otonomi fiskal daerah juga bisa dilihat dengan perbandingan antara Sumbangan Pemerintah Pusat (Sum) dengan Total Penerimaan Daerah (TPD): Sum/TPD. Makin tinggi perbandingan ini menunjukkan makin tingginya ketergantungan masing-masing daerah kepada pemerintah pusat yang berarti menunjukkan makin menurunnya derajat otonomi daerah.

Tabel 13. Perbandingan Sum dan TPD Kabupaten/Kota se-Propinsi D.I Yogyakarta 2000-2006

	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta	Rata-rata/tahun
2000	55.00%	55.43%	47.48%	49.14%	32.36%	47.88%
2001	87.71%	62.25%	70.20%	61.63%	46.53%	65.66%
2002	73.70%	72.08%	80.51%	61.43%	51.01%	67.75%
2003	63.73%	67.13%	69.56%	70.90%	48.20%	63.91%

2004	75.40%	72.00%	67.19%	68.93%	57.98%	68.30%
2005	78.02%	72.51%	80.07%	67.33%	56.22%	70.83%
2006	79.70%	78.76%	83.63%	72.43%	61.65%	75.24%
Rata-rata per kab/kota	73.33%	68.59%	71.23%	64.54%	50.56%	

Sumber : D.I Yogyakarta dalam Angka 1999-2006(BPS,diolah)

Tabel di atas menggambarkan bagaimana perbandingan antara Sumbangan Pemerintah Pusat (Sum) kepada masing-masing Kabupaten/Kota se Propinsi D.I Yogyakarta setelah pelaksanaan otonomi daerah (2000-2006). Ternyata untuk semua kabupaten/kota memiliki nilai rata-rata perbandingan Sum/TPD sangat tinggi yakni di atas 50% bahkan ada yang di atas 70% (di Kulonprogo sebesar 73.33% dan Gunungkidul sebesar 71.23%) sedangkan di Bantul, Sleman dan Yogyakarta masing-masing 68.59%, 64.54%, dan 50.56%). Bahkan sejak 2003 sumbangan pemerintah pusat mengalami *trend* kenaikan dimana pada 2006 hingga mencapai 75.24%. Data ini menunjukkan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi yang juga mengindikasikan bahwa derajat otonomi fiskal masih sangat rendah.

Selain itu, dalam melihat kinerja keuangan daerah dapat menggunakan derajat kemandirian daerah untuk mengukur seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah (Halim, 2001), antara lain: Pertama dilihat bagaimana perbandingan PAD dibandingkan dengan tingkat pengeluaran daerah (TKD) atau PAD/TKD. Makin tinggi perbandingan ini berarti makin menunjukkan kemandirian daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

Tabel 14. Perbandingan PAD dan TKD Kabupaten/Kota se-Propinsi D.I Yogyakarta 2000-2006

	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta	Rata-rata/ tahun
2000	9.45%	7.50%	5.81%	12.12%	25.22%	12.02%
2001	4.93%	5.13%	3.99%	9.47%	16.55%	8.01%
2002	6.51%	6.65%	5.39%	10.50%	17.66%	9.34%
2003	5.40%	7.80%	5.45%	9.89%	16.87%	9.08%
2004	5.55%	7.97%	5.49%	10.82%	16.96%	9.36%
2005	7.48%	7.92%	6.46%	11.77%	19.81%	10.69%
2006	6.08%	6.49%	4.91%	12.28%	16.04%	9.16%

Rata-rata per kab/kota	6.49%	7.07%	5.36%	10.98%	18.44%
------------------------	-------	-------	-------	--------	--------

Sumber : D.I Yogyakarta dalam Angka 1999-2006(BPS,diolah)

Tabel 14 di atas menggambarkan bagaimana peranan PAD dalam pembiayaan APBD secara keseluruhan di Kabupaten/Kota se Propinsi D.I Yogyakarta setelah pelaksanaan otonomi daerah (2000-2006). Dilihat dari data statistik rata-rata tingkat perbandingan masing-masing kabupaten/kota sangat kecil yakni di bawah 10% (Kulonprogo mengalami rata-rata kenaikan PAD 6,49%, Bantul sebesar 7,07%, Gunungkidul 5,36%), hanya Sleman dan Kota Yogyakarta yang nilai perbandingannya di atas 10% yakni masing-masing 10,98% dan 18,44%. Data ini menunjukkan bahwa peran PAD terhadap Total Pengeluaran Daerah (TKD) masih sangat rendah. Ini berarti menunjukkan kinerja keuangan yang diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah masih sangat rendah.

Kedua, bagaimana kontribusi atau peran PAD terhadap pembiayaan rutin (KR) di masing-masing daerah yakni dengan membandingkan PAD/KR.Makin tinggi perbandingan ini berarti menunjukkan peran PAD dalam pembiayaan rutin pembangunan makin besar.

Tabel 15. Perbandingan antara PAD terhadap KR Kab/Kota se-Propinsi D.I Yogyakarta 2000-2006

	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta	Rata-rata/ tahun
2000	13.52%	10.88%	10.03%	20.15%	40.31%	18.98%
2001	7.38%	6.19%	5.42%	11.64%	22.93%	10.71%
2002	88.27%	86.34%	7.06%	13.04%	29.54%	44.85%
2003	18.27%	30.65%	7.47%	33.93%	129.60%	43.98%
2004	47.08%	28.02%	30.52%	39.64%	107.09%	50.47%
2005	55.47%	29.59%	9.40%	46.38%	122.65%	52.70%
2006	43.03%	24.86%	8.05%	48.95%	139.66%	52.91%
Rata-rata per kab/kota	39.00%	30.93%	11.13%	30.53%	84.54%	

Sumber : D.I Yogyakarta dalam Angka 1999-2006(BPS,diolah)

Tabel 15 di atas menunjukkan bagaimana peranan PAD dalam pembiayaan rutin pembangunan secara keseluruhan di Kabupaten/Kota se Propinsi D.I Yogyakarta setelah pelaksanaan otonomi daerah (2000-2006). Dilihat dari data statistik rata-rata tingkat perbandingan masing-masing kabupaten/kota cukup variatif, khusus di Gunungkidul sangat

kecil yakni 11.13% yang menunjukkan untuk di daerah ini peran PAD terhadap pembiayaan rutin masih sangat rendah Sedangkan untuk Kulonprogo, Bantul dan Sleman peran PAD terhadap pembiayaan rutin cukup signifikan masing-masing 39.00%, 30.93% dan 30.53%. Sedangkan untuk Kota Yogyakarta peran PAD terhadap pembiayaan rutin pemerintah daerahnya sangat besar yakni mencapai 84.54%. Selain itu perkembangan peran PAD terhadap KR dalam tiga tahun terakhir (2004,2005, dan 2006) mengalami *trend* kenaikan dan peran PAD terhadap KR makin besar Ini berarti dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur dari peran PAD terhaap KR makin baik yang berarti kemandirian keuangan daerah dalam pembiayaan rutin makin baik.

Ketiga, dengan melihat bagaimana peran (PAD + BHPBP) terhadap TKD untuk mengukur bagaimana peranan keduanya terhadap pengeluaran total daerah.

Tabel 16. Perbandingan PAD dan BHPBP terhadap TKD Kab/Kota se-Propinsi D.I.Y 2000-2006

	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta	Rata-rata/ tahun
2000	17.44%	16.06%	12.77%	19.78%	39.02%	21.01%
2001	8.33%	9.13%	7.69%	16.20%	30.14%	14.30%
2002	10.11%	10.49%	9.15%	18.04%	25.52%	14.66%
2003	8.63%	11.86%	9.10%	15.68%	24.81%	14.01%
2004	8.47%	12.01%	7.76%	16.38%	24.08%	13.74%
2005	10.56%	11.98%	8.86%	17.77%	26.91%	15.22%
2006	8.56%	9.68%	7.40%	17.89%	21.80%	13.06%
Rata-rata per kab/kota	10.30%	11.60%	8.96%	17.39%	27.47%	

Sumber : D.I Yogyakarta dalam Angka 1999-2006(BPS,diolah)

Tabel 16 di atas menunjukkan bagaimana peranan PAD dan BHPBP terhadap pembiayaan secara keseluruhan (TKD) di Kabupaten/Kota se Propinsi D.I Yogyakarta setelah pelaksanaan otonomi daerah (2000-2006). Dilihat dari data statistik rata-rata tingkat perbandingan masing-masing kabupaten/kota masih rendah sekitar 10%. Hanya di Kota Yogyakarta peran PAD dan BHPBP terhadap TKD relatif besar yakni 27.47%. Ini berarti dilihat dari kinerja keuangan daerah (kemandirian keuangan) yang diukur dari peran PAD dan BHPBP terhadap TKD masih relatif kecil.

4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Derajat Otonomi Fiskal Daerah

Pertama kita uji asumsi klasik yakni ada tidaknya multikolinieritas, otokorelasi dan heteroskedastisitas. Pertama, menguji multikolinieritas. Salah satu cara mengukur multikolinieritas yang mudah cara menghitungnya adalah menggunakan *Variance Inflation Factor (VIF)* merupakan suatu cara mendeteksi multikolinieritas dengan melihat sejauh mana variabel penjelas dapat diterangkan oleh semua variabel penjelas lainnya di dalam persamaan regresi. Pada umumnya, multikolinieritas dikatakan berat apabila angka VIF dan suatu variabel melebihi 10. Dari pengolahan data (tabel 19) terlihat bahwa angka VIF bernilai sekitar 2-3 atau kurang dari 10. Jadi multikolinieritas tidak terjadi.

Kedua, Untuk menguji ada tidaknya otokorelasi dengan menggunakan statistik *d Durbin-Watson*. Dengan menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95 persen, uji regresi dengan empat variabel dependen dan jumlah pengamatan sebanyak 35 buah, Tabel Statistik Durbin-Watson memperlihatkan nilai $d_L=1,07$ dan $d_U=1,63$. Dari hasil pengolahan data (tabel 17) terlihat nilai statistik *d* sebesar 1,74 (nilai ini lebih besar dari nilai $d_U=1,63$, tapi juga dibawah nilai $4-d_U=2,37$). Ini berarti bahwa tidak ada autokorelasi.

Ketiga, menguji heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggambarkan *scatter diagram* nilai residu (dalam hal ini terhadap ADR) dimana terlihat (dalam lampiran) bahwa residu-nya tidak membentuk suatu pola sebaran tertentu. Ini menunjukkan model tidak mengandung heteroskedastisitas.

Jadi, telah kita uji bahwa ketiganya baik multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas tidak terdapat dalam model ini.

Hasil pengolahan data (tabel 17) memberikan output yang menginformasikan bahwa R^2 cukup besar yaitu 0.721 yang berarti bahwa 72,1% variabel-variabel bebas yang digunakan dalam model ini mampu menjelaskan variasi derajat otonomi fiskal daerah secara keseluruhan. Sedangkan sisanya sebesar 27.9% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model.

Tabel 17 Model Summary dari Output Regresi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.849 ^a	.721	.689	.0311358	.721	22.582	4	35	.000	1.742

a. Predictors: (Constant), PP, PDRB, BM, BN

b. Dependent Variable: ADR

Pada tabel 18 (Anova) menunjukkan bahwa secara bersama-sama dalam periode pengamatan semua variabel bebas (tingkat sumbangan, tingkat bantuan, pembiayaan pemerintah dan PDRB) secara signifikan mempengaruhi derajat otonomi fiskal daerah. Hal ini ditunjukkan pada tabel di mana nilai F-hitung sebesar 22,582 lebih besar daripada nilai F tabel $(4,31) = 2,69$ pada derajat kepercayaan 5%.

Tabel 18 Output Regresi (Anova)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.088	4	.022	22.582	.000 ^a
	Residual	.034	35	.001		
	Total	.121	39			

a. Predictors: (Constant), PP, PDRB, BM, BN

b. Dependent Variable: ADR

Dari hasil pengolahan data (tabel 19) memperlihatkan bahwa variabel tingkat sumbangan (BM) dan PDRB secara statistik signifikan mempengaruhi derajat otonomi fiskal daerah dengan derajat kepercayaan 5%. Variabel BM memiliki hubungan negatif dengan derajat otonomi fiskal sedangkan variabel PDRB memiliki hubungan positif dengan derajat otonomi fiskal. Sedangkan variabel bantuan (BN) dan Pembiayaan Pemerintah (PP) secara statistik tidak signifikan mempengaruhi derajat otonomi fiskal.

Tabel 19 Output Regresi (Coefficients)

Coefficients ^a												
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	.266	.043		6.163	.000	.178	.353					
BM	-.360	.056	-.826	-6.387	.000	-.474	-.245	-.641	-.734	-.570	.477	2.095
BN	-.113	.139	-.122	-.816	.420	-.395	.169	.008	-.137	-.073	.354	2.823
PDRB	1.514	.421	.545	3.598	.001	.660	2.369	.506	.520	.321	.348	2.873
PP	.164	.186	.152	.885	.382	-.212	.541	-.544	.148	.079	.269	3.711

a. Dependent Variable: ADR

5. Kesimpulan

Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya diukur melalui kinerja keuangan daerah yaitu menggunakan derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio antara Pendapatan Asli daerah (PAD) dengan Total Penerimaan Daerah (TPD) untuk semua Kabupaten/Kota di Propinsi DIY sangat rendah yakni di bawah 10%. Begitu juga rasio antara Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) dengan Total Penerimaan Daerah (TPD). Hal ini mengindikasikan bahwa derajat otonomi fiskal (dilihat dari rasio PAD dan BHPBP terhadap APBD) sangat rendah. Di sisi lain rasio antara Sumbangan Pemerintah Pusat (Sum) dengan Total Penerimaan Daerah (TPD) Kabupaten/Kota di Propinsi DIY sangat tinggi di atas 50% bahkan ada yang di atas 70% . Hal ini mengindikasikan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.

Cara lain untuk melihat kinerja keuangan daerah adalah dengan menggunakan derajat kemandirian daerah untuk mengukur seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio PAD terhadap total pengeluaran daerah (TKD) sangat rendah dibawah 10%. Hal ini menunjukkan bahwa peran PAD terhadap TKD masih sangat rendah yang mengindikasikan bahwa kemandirian keuangan daerah masih sangat rendah. Namun temuan dalam penelitian ini, kontribusi atau peran PAD terhadap pembiayaan rutin KR cukup signifikan untuk Kabupaten Kulonprogo, Bantul dan Sleman masing-masing 39.00%, 30.93% dan 30.53% bahkan untuk Kota Yogyakarta peran PAD terhadap pembiayaan rutin pemerintah daerahnya sangat besar yakni mencapai 84.54%.

Dari hasil di atas secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten/Kota di Propinsi DI Yogyakarta kurang berhasil. Hal ini ditandai dengan rendahnya kenaikan derajat otonomi fiskal daerah di DIY baik dilihat dari kinerja keuangan maupun tingkat kemandirian keuangannya.

Hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi derajat otonomi fiskal dan bagaimana hubungan antar faktor tersebut menunjukkan bahwa tingkat sumbangan, tingkat bantuan, pembiayaan pemerintah dan potensi ekonomi secara bersama-sama signifikan mempengaruhi derajat otonomi fiskal daerah di Kabupaten/Kota di Propinsi D.I

Yogyakarta. Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa variabel tingkat sumbangan (BM) dan PDRB secara statistik signifikan mempengaruhi derajat otonomi fiskal daerah dimana variabel BM memiliki hubungan negatif dan variabel PDRB memiliki hubungan positif dengan derajat otonomi fiskal. Sedangkan variabel Bantuan (BN) dan Pembiayaan Pemerintah (PP) secara statistik tidak signifikan mempengaruhi derajat otonomi fiskal.

6. Daftar Pustaka

- Agustino L, Erlangga, *Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Surabaya*, CURES Working Paper No 05/01 January 2005
- Isdijoso, Brahmantio & Wibowo, Tri, *Analisis Kebijakan Fiskal pada Era Otonomi Daerah*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, Volume 6 Nomor 1, Maret 2002
- Koswara, Ekom, “*Faktor-faktro yan mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia : Suau Studi tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II Menurut UU No. 5 Tahun 1974*”, Disertasi, S3, Fakultas Ekonomi Sosial Politik UGM, Yogyakarta, 1996
- Lodewyk, Richard, *Otonomi Keuangan dan Ekonomi Daerah Tingkat II di Propinsi Sulawesi Utara*, Tesis,S2, Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1999
- Muktiali, Mohammad, “*Derajat Otonomi Fiskal Daerah di Indonesia : Studi Kasus pada 26 Dati II yang Menjadi Percontohan Otonomi Daerah*”, Tesis, S2, Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2000
- Nanga, Munga, “*Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II, Studi Kasus di Kabupaten Malang, Probolinggo, dan Trenggalek (Propinsi Jawa Timur)*”, Tesis, S2, Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1991
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemeintah Daerah, 1999
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemeintah Pusat dan Daerah, 1999
- Smith, Roger S., *Financing Cities in Developng Countries*, International Monetary Fund Staff paper, Vol. 7 No. 21, 1991
- Sodik, Jamzani & Nuryadin, Didi, *Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 6 Nomor 2, Oktober 2005
- Suparmoko, *Ekonomi Publik: untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*, Penerbit Andi Yogyakarta, 2002
- Way, Yakobus, “*Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah : Studi Kasus di Kabupaten Sorong, Jayapura dan Jaya Wijaya*”, Tesis, S2, Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1999

Lampiran

Tabel 3. PAD Kabupaten/Kota se-Propinsi D.I. Yogyakarta 1999-2006 (000 Rp)

	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta
1999	5,961,693	8,011,806	5,409,513	17,125,445	24,790,128
2000	6,726,479	7,074,418	5,719,379	17,889,885	22,452,952
2001	10,132,946	14,073,123	8,852,286	29,677,397	40,352,593
2002	16,225,501	22,425,147	13,486,860	38,908,193	56,377,460
2003	18,250,898	32,882,359	17,481,692	42,522,488	68,621,564
2004	17,514,817	32,181,481	20,728,379	54,913,300	70,412,081
2005	22,512,410	33,701,537	23,424,202	64,030,957	79,414,345
2006	28,891,548	39,330,140	25,485,903	86,472,070	91,626,503

Sumber : D.I Yogyakarta dalam Angka 1999-2006(BPS,diolah)

Tabel 4. Pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota se-Propinsi D.I. Yogyakarta 1999-2006 (%)

	Kulonprog o	Bantul	Gunungkid ul	Sleman	Kota Yogyakarta	Rata- rata/ tahun
2000	112.83%	88.30%	105.73%	104.46%	90.57%	100.38%
2001	150.64%	198.93%	154.78%	165.89%	179.72%	169.99%
2002	160.13%	159.35%	152.35%	131.10%	139.71%	148.53%
2003	112.48%	146.63%	129.62%	109.29%	121.72%	123.95%
2004	95.97%	97.87%	118.57%	129.14%	102.61%	108.83%
2005	128.53%	104.72%	113.01%	116.60%	112.79%	115.13%
2006	128.34%	116.70%	108.80%	135.05%	115.38%	120.85%
Rata-rata per kab/kota	126.99%	130.36%	126.12%	127.36%	123.21%	126.81%

Sumber : D.I Yogyakarta dalam Angka 1999-2006(BPS,diolah)

Tabel 5. Sumbangan Pemerintah Pusat ke Kabupaten/Kota se-Propinsi D.I. Yogyakarta 1999-2006 (%)

	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta
1999	44,815,441	59,912,342	52,582,900	78,219,325	38,655,212
2000	41,444,637	55,171,355	48,794,969	75,523,791	35,022,637
2001	207,897,265	180,450,612	157,630,914	205,430,376	113,437,221
2002	209,056,943	258,680,000	216,810,711	255,350,000	162,874,512
2003	215,470,000	292,700,000	251,340,000	304,780,000	196,100,000
2004	215,470,000	292,700,000	255,640,000	307,330,000	197,787,000
2005	231,438,000	308,106,000	268,320,000	318,140,000	201,230,000
2006	344,035,000	470,847,000	432,868,000	485,397,000	316,832,000

Sumber : D.I Yogyakarta dalam Angka 1999-2006(BPS,diolah)

Tabel 6. Perkembangan Sumbangan Pemerintah Pusat ke Kabupaten/Kota se-Propinsi D.I. Yogyakarta 1999-2006 (%)

	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta	Rata-rata/ tahun
2000	92.48%	92.09%	92.80%	96.55%	90.60%	92.90%
2001	501.63%	327.07%	323.05%	272.01%	323.90%	349.53%
2002	100.56%	143.35%	137.54%	124.30%	143.58%	129.87%
2003	103.07%	113.15%	115.93%	119.36%	120.40%	114.38%
2004	100.00%	100.00%	101.71%	100.84%	100.86%	100.68%
2005	107.41%	105.26%	104.96%	103.52%	101.74%	104.58%
2006	148.65%	152.82%	161.33%	152.57%	157.45%	154.56%
Rata-rata per kab/kota	164.83%	147.68%	148.19%	138.45%	148.36%	149.50%

Sumber : D.I Yogyakarta dalam Angka 1999-2006(BPS,diolah)

Tabel 7. Bantuan Pemerintah Pusat ke Kabupaten/Kota se-Propinsi D.I. Yogyakarta 1999-2006

(%)

	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta
1999	13,669,092	17,329,477	19,820,618	16,177,932	16,442,021
2000	12,875,926	19,799,529	14,002,757	22,582,507	13,235,322
2001	2,693,438	15,000,000	750,000	30,141,155	20,714,251
2002	7,300,000	10,000,000	10,000,000	10,600,000	4,200,000
2003	7,300,000	10,000,000	10,000,000	10,600,000	4,200,000
2004	10,720,000	11,680,000	8,280,000	9,480,000	5,500,000
2005	11,360,000	12,150,000	10,790,000	10,600,000	6,600,000
2006	32,216,322	33,890,000	29,080,000	25,800,000	4,800,000

Sumber : D.I Yogyakarta dalam Angka 1999-2006(BPS,diolah)

Tabel 8. Perkembangan Bantuan Pemerintah Pusat ke Kabupaten/Kota
se-Propinsi D.I. Yogyakarta 1999-2006 (%)

	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta	Rata- rata/ tahun
2000	94.20%	114.25%	70.65%	139.59%	80.50%	99.84%
2001	20.92%	75.76%	5.36%	133.47%	156.51%	78.40%
2002	271.03%	66.67%	1333.33%	35.17%	20.28%	345.29%
2003	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2004	146.85%	116.80%	82.80%	89.43%	130.95%	113.37%
2005	105.97%	104.02%	130.31%	111.81%	120.00%	114.42%
2006	283.59%	278.93%	269.51%	243.40%	72.73%	229.63%
Rata-rata per kab/kota	146.08%	122.35%	284.57%	121.84%	97.28%	154.42%

Sumber : D.I Yogyakarta dalam Angka 1999-2006(BPS,diolah)

Tabel 9 PDRB dengan Harga Berlaku Kabupaten/Kota se Propinsi DI Yogyakarta

	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta
1999	901,765	1,967,640	1,745,087	2,965,432	2,780,539
2000	909,847	2,259,481	2,224,008	3,560,985	3,189,019
2001	997,034	2,504,224	2,420,480	4,119,788	3,630,052
2002	1,114,494	2,784,441	2,642,624	4,874,054	4,217,393
2003	1,645,975	3,739,408	3,089,681	5,904,366	5,266,753
2004	1,832,453	4,238,736	3,389,809	6,604,997	5,875,890
2005	2,074,363	4,898,268	3,853,621	7,669,099	6,770,089
2006	2,414,960	5,725,366	4,390,869	8,902,449	7,763,933

Sumber : D.I Yogyakarta dalam Angka 1999-2006(BPS,diolah)

Tabel 10 Perkembangan PDRB dengan Harga Berlaku Kabupaten/Kota se Propinsi DI Yogyakarta

	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta	Rata-rata/ tahun
2000	100.90%	114.83%	127.44%	120.08%	114.69%	115.59%
2001	109.58%	110.83%	108.83%	115.69%	113.83%	111.75%
2002	111.78%	111.19%	109.18%	118.31%	116.18%	113.33%
2003	147.69%	134.30%	116.92%	121.14%	124.88%	128.98%
2004	111.33%	113.35%	109.71%	111.87%	111.57%	111.57%
2005	113.20%	115.56%	113.68%	116.11%	115.22%	114.75%
2006	116.42%	116.89%	113.94%	116.08%	114.68%	115.60%
Rata-rata per kab/kota	115.84%	116.71%	114.24%	117.04%	115.86%	115.94%